

**IMPLEMENTASI REKRUTMEN POLITIK PARTAI
GERAKAN INDONESIA RAYA**

(Skripsi)

Oleh
OKTANINA BR SEMBIRING



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI REKRUTMEN POLITIK PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Oleh
Oktanina Br Sembiring

Sukses atau tidaknya sebuah partai politik dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses implementasi rekrutmen yang dikembangkannya. Wujud dari keberlanjutan partai politik adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika partai politik untuk masa depan. Partai Gerindra dapat dikatakan baru dalam perpolitikan Indonesia dan Kota Bandar Lampung khususnya, akan tetapi Partai Gerindra sudah mampu mewujudkan kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian kualitatif deskriptif teori Rekrutmen Liliy Romli. *Pertama*, Bagaimana Implementasi rekrutmen dan proses kaderisasi Partai Gerindra di Kota Bandar Lampung?. *Kedua*, apakah faktor penghambat rekrutmen Partai Gerindra di Kota Bandar Lampung?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Proses Rekrutmen yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra bersifat terbuka baik dalam merekrut anggota partai ataupun jabatan publik. *Kedua*, konsep rekrutmen Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Bandar Lampung lebih mengandalkan Pendidikan Politik secara informal untuk menumbuhkan suasana kekeluargaan yang dapat memberikan kenyamanan dalam pemberian materi dan pembahasan isu terkini, Suasana tersebut diperlukan karena mayoritas anggota DPC partai Gerindra Kota Bandar Lampung berlatar belakang pekerjaan swasta dan pendidikan yang rata-rata lulusan sekolah menengah atas.

Kata Kunci : Implementasi ,Rekrutmen , Rekrutmen Politik

ABSTRACT

POLITICAL RECRUITMENT IMPLEMENTATION INDONESIA RAYA MOVEMENT PARTY

**By
Oktanina Br Sembiring**

The success or failure of a political party can be measured by its success in the process of implementing recruitment he developed. The manifestation of the continuity of political parties is the emergence of cadres who have the capability and commitment to the dynamics of political parties for the future. The Gerindra Party can be said to be new in the politics of Indonesia and the City of Bandar Lampung in particular, but the Gerindra Party has been able to realize cadres who have capability and commitment.

In this study using qualitative descriptive research method Liliy Romli' Recruitment theory. First, how is the implementation of recruitment and regeneration process of the Gerindra Party in Bandar Lampung City ? Second, what are the inhibiting factors for Gerindra Party recruitment in Bandar Lampung City ? The results of this study are first, the Recruitment Process carried out by the DPC of the Gerindra Party is open both in recruiting party members and public office. Second, the concept of recruiting the Bandar Lampung Branch of the Gerindra Party Board to rely more on informal Political Education to foster a family atmosphere that can provide comfort in the provision of material and discussion of the latest issues. and education are the average high school graduates.

Keywords: Implementation, Recruitment, Political Recruitment

**IMPLEMENTASI REKRUTMEN POLITIK PARTAI
GERAKAN INDONESIA RAYA**

Oleh
OKTANINA BR SEMBIRING

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI REKRUTMEN POLITIK
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

Nama Mahasiswa : **Oktanina Br Sembiring**

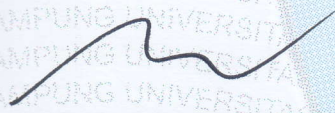
Nomor Pokok Mahasiswa : **1216021091**

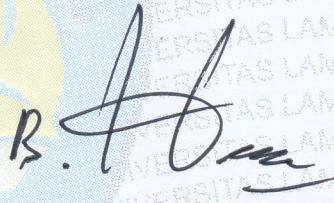
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

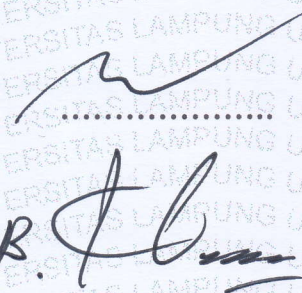
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Penguji : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Februari 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Februari 2019



Oktanina Br Sembiring
1216021091

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabanjahe, pada tanggal 04 Oktober 1993 dan saat ini berusia 25 tahun. Putri Pertama dari keluarga Bapak Dosmei Sembiring dan Mamak Purnama Br Tarigan, yang saat ini tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo Medan Sumatra Utara.

Menempuh pendidikan di playgroup TK Jedija Kabanjahe, SD Negeri 2 Kabanjahe, SMP Negeri 2 Kabanjahe, SMA Negeri 1 Kabanjahe. Pada tahun 2012 dengan ucapan syukur penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik melalui seleksi Jalur Undangan.

Selain menjadi mahasiswa Universitas Lampung, Penulis aktif didalam kegiatan eksternal dan internal Kampus. Tahun 2013 Menyisip sebagai bidang keuangan di KAKR GBKP Bandar Lampung, dan pada tahun 2014 hingga sampai pada saat ini menjadi pengurus BP KAKR GBKP Bandar Lampung. Pada tahun 2014 kembali terpilih didalam pelayanan ini untuk menjadi Pengurus BP KAKR GBKP untuk 1 periode yaitu 5 tahun. Penulis juga mengambil bagian di Persekutuan kampus yaitu sebagai anggota Devisi Doa dan Pemerhati (DP) di Persekutuan Doa Oikumene (PDO). Pada tahun 2015 kembali melayani sebagai anggota Devisi Doa dan Pemerhati (DP) di Persekutuan Doa Oikumene.

Penulis juga tergabung dalam organisasi kekeluargaan di Kota Bandar Lampung yang disebut Ikatan Mahasiswa Karo Rudang Mayang Lampung (IMKA), dimana yang tergabung di dalam organisasi ini merupakan Mahasiswa/Mahasiswi dari berbagai Universitas di Bandar Lampung. didalam organisasi ini penulis juga mengambil bagian sebagai anggota bidang Olahraga pada tahun 2013. Pada tahun 2015 penulis kembali diberikan tanggung jawab sebagai Koordinator bidang pendidikan .

MOTTO

Yeremia 1:5

Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim Ibumu , Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan , Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa.

YEREMIA 29:11

Sebab Aku ini mengetahui rancangan –rancangan yang ada pada-Ku mengenai kamu,demikianlah Firman Tuhan,yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan ,untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Bapak, Yesus Kristus atas segala hikmat dan berkatnya serta dengan ini kupersembahkan karyaku ini kepada orang – orang terkasih selama proses penyelesaian skripsi ini.

KELUARGA

Kepada kedua orang tuaku dan keluarga besarku yang selalu mendoakan , selalu ada , membantu dan memberi motivasi selama proses pendidikan hingga bisa menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, dan nasehat yang menguatkan aku untuk menyelesaikan proses pendidikanku di Universitas Lampung.

SAHABAT - SAHABAT TERKASIH

Terimakasih untuk orang-orang yang aku kasih dan cintai sahabat dan teman – teman yang selalu menghadirkan sukacita, tawa, kebersamaan dan motivasi. Terimakasih buat kalian yang selalu ada .

...serta...

Almamater Jercinta

Universitas

Lampung

SANWACANA

Puji Syukur dan Kemuliaan bagi Tuhanku yang Luar biasa karena hikmat kebijaksanaan dan Anugerah-Nya yang melimpah dan menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Rekrutmen Politik Partai Gerakan Indonesia Raya” . Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelas Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari Doa, motivasi dan Bantuan dari berbagai Pihak yang ada hingga skripsi ini boleh diselesaikan. Sehingga dalam hal ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.S.i. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs.R.Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pak Darmawan Purba S.IP , M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk membimbing, yang selalu ada,memberikan koreksi dan penilaian serta membantu penulis menyelesaikan skripsi hingga penulis dapat meraih gelar sarjana di Universitas Lampung.

4. Bapak Budi Harjo, S.Sos. M.IP. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan arahan, masukan, serta motivasi , semangat serta saran kepada penulis.
5. Seluruh jajaran Dosen, Staff dan Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Kedua orang tua yang aku kasihi dan sayangi Bapak dan Mamak ku Tercinta yang telah menjadi orang tua terbaik di Dunia ini yang selalu setia dan selalu memberikan dukungan, dan doa kepada penulis, setia menunggu penulis untuk mendapatkan gelar sarjana .
7. Kekelengku yang aku kasihi Bang Imanuel Kemenangenta Perangin-angin (Nangin). Terimakasih buat selalu ada di saat suka maupun duka, memberikan dukungan ,membawa turut serta dalam doa, semangat dan sangat membantu hingga saat ini serta menjadi seseorang yang sangat mengasihi penulis Serta motivasi dan semangat terkhusus Orang tua (Bibik) .
8. Ucapan Terimakasih Kepada Keluarga “sagala” , Bibik Kila dan Keluarga. buat dukungan dan motivasi yang diberikan selama menempuh perkuliahan hingga mendapatkan gelar ini.
9. Keluarga besar PDO (Persekutuan Doa Oikoumene) Fisip Unila. Terimakasih kepada alumni, abang/kakak ,teman-teman ,adik – adik yang telah menjadi bagian dari proses perjalanan di kampus. Terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan teman – teman.
10. Kepengurusan PDO Fisip Unila Tahun 2013-2014(Eklesia) kepada Cety Angelia, Fanny Pangaribuan, Angga Dermawan Siregar, Andi Sinuhaji, Paksi Widiantoro, Yessy Tathiana Turnip, Steven Anzazmorrow Siregar dan

Atanasius Ifan. Terimakasih atas segala kebersamaan dan proses yang telah kita lewati bersama – sama, terimakasih atas segala doa dan semangat serta terimakasih atas segala sesuatu yang telah diberikan.

11. Kepengurusan PDO Fisip Unila Tahun 2014-2015(No Name) Advent Maret Hutajulu, Andi Sinuhaji, Angga Dermawan Siregar,Devi Yona Sinaga, Gita Lamtiur Pakpahan,Intan Sitorus, Paksi Widyantoro,Sarah Destio Purba,Satria Kencana Sitepu, Steven Anzazmorrow Siregar,Jenni Brutu Terimakasih buat Kebersamaan dan Proses di dalam pelayanan yang kita lakukan bersama.
12. Majelis dan Jemaat GBKP Bandar Lampung Terimakasih buat perhatian dan semangat yang diberikan ketika Penulis sedang berada di bangku perkuliahan, selama penyusunan skripsi ini hingga Penulis mendapatkan gelar.
13. Komisi KAKR /Abang/Kakak dan teman-teman sepelayanan di KAKR GBKP Bandar Lampung yang setia menopang dalam doa, memberi semangat dan memberi pelajaran yang sangat berharga didalam menjalankan pelayanan sebagai Guru KAKR GBKP Bandar Lampung.
14. Terimakasih Kepada teman-teman sepelayanan BP KAKR GBKP Bandar Lampung Ricky Pahlevi Sinulingga S.T, Yaloinaita Br Pinem S.Pd,Gabriel Erick Rasmana Tarigan S.Kom , dr. Erisa Senthayana Br Surbakti buat kebersamaan kita selama ini , dan Doa yang selalu ada dan saling menguatkan.
15. Terimakasih banyak Kepada PERMATA GBKP Bandar Lampung buat persekutuan yang sangat membangun pribadi ketika ikut berada didalamnya , Tuhan Memberkati Semua teman-teman PERMATA.
16. Kepada Alumni , abang/kakak/teman-teman Ikatan Mahasiswa Karo Rudang Mayang Lampung (IMKA RML) yang sudah menjadi keluarga , berbagi

cerita bersama, senasib dan sepenanggungan di tanah perantauan di Bandar Lampung “Sai Bumi Rua Jurai” dengan slogan yang harus selalu kami tanamkan dalam hati “ Mela mulih adi la Rulih “

17. Salam hangat buat Saudara ku Posma Ulina Sianipar saudara yang aku kenal dan Berbagi suka duka bersama di tanah perantaun ini.
18. Ucapan terimakasih Kepada Teman-Teman Kepengurusan IMKA RML Periode 2013 dan Periode 2015
19. Terimakasih banyak Kepada Teman-teman Angkatan 2012 yang berasal dari berbagai daerah , suku dan budaya yang bersama-sama mulai menginjakan kaki di dunia perkuliahan yang sudah lulus dan mencari pekerjaan. Banyak cerita yang dilalui bersama terimakasih buat kebersamaan yang kita lalui selama ini Andi Sinuhaji, Steven Anzazmorrow Siregar,Bayu adonia Sembiring, Infantri Sembiring, Yessy Yolanda Sarah Br Tarigan, Gagari Alfiyunita Br Surbakti, Efranisa Br Ginting, Pebrianta Tarigan,Janwira Sembiring, Ina Febria Br Ginting,Hendire Barus,Emia Br Sebayang, Berlian Br Sinulingga .
20. Teman-Teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012 terimakasih buat kebersamaan yang kita jalani selama bangku perkuliahan.
21. Terimakasih banyak buat adek yang aku kasihi Bobby Barasa ,Sita Simamora dan Ria Nababan yang juga sangat membantu ,jadi teman sharing dan berbagi.
22. Terimakasih kepada Seluruh staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Mbak sheela, Mas dede serta Staf FISIP Universitas Lampung yang tak dapat ditulis satu persatu.

23. Terimakasih kepada pengurus dan anggota Partai politik selaku informan Bapak Malikin, Bapak Gunandi Ibrahim dari DPD Partai Gerindra dan DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung.
24. Terimakasih banyak buat teman-teman IMKA –Rudang Mayang Lampung yang juga sangat memotivasi penulis.
25. Teman-Teman KKN Bg Fredy Gurning, Tomi Syahputra, Ka Agata, Dendy , mbah serta pak Lurah dan Bu Lurah Tulang Bawang Barat. Terimakasih banyak buat kebersamaan kita selama 40 hari banyak hal yang didapat ketika melakukan pengabdian di tengah-tengah masyarakat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tuhan Memberkati.

Bandar Lampung, 08 februari 2019
Penulis,

Oktanina Br Sembiring

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Implementasi.....	12
B. Konsep Rekrutmen.....	15
1. Prinsip-Prinsip Rekrutmen.....	15
2. Sumber Rekrutmen	16
3. Pengertian Rekrutmen Politik.....	17
4. Pola Rekrutmen Politik.....	21
C. Konsep Partai Politik	25
1. Pengertian Partai Politik	25
2. Pembentukan Partai Politik.....	28
3. Tujuan dan Fungsi Partai politik.....	30
4. Tipologi Partai Politik.....	36
D. Konsep Pemilihan Umum	39
1. Sistem Pemilihan Umum	40
2. Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu di Indonesia	42
E. Kerangka pikir	43
III. METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
D. Penentuan Informan	49
E. Jenis Data	49
F. Sumber Data.....	50
G. Teknik Pengumpulan Data.....	52
H. Teknik Analisis Data.....	56

IV. GAMBARAN UMUM.....	58
A. Partai Gerakan Indonesia Raya.....	58
1. Sejarah Partai Gerakan Indonesia Raya.....	58
B. Makna Lambang / Tanda Gambar Partai Gerindra.....	63
C. Visi dan Misi Partai Gerakan Indonesia Raya	64
1. Visi Partai Gerakan Indonesia Raya	65
2. Misi Partai Gerakan Indonesia Raya	65
D. Prinsip Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya	66
E. Tugas Partai Gerakan Indonesia Raya	68
F. Tujuan dan Fungsi Partai Gerakan Indonesia Raya.....	69
G. Susunan Kepengurusan DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Lampung 71	
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Hasil Penelitian	75
1. Rekrutmen Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Bandar Lampung.....	75
2. Kaderisasi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Bandar Lampung.....	84
3. Model Rekrutmen Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra	89
4. Dasar Rekrutmen Politik Partai Gerindra	89
5. Rekrutmen Anggota Partai Gerindra	90
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekrutmen Politik	100
C. Pembahasan.....	102
1. Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik.....	102
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	107
A. Simpulan	107
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka Pikir	44
2. Rekrutmen Anggota Partai Gerindra.....	76
3. Skema Perekrutan Anggota Partai	94

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Sebagai aktor dalam negara demokrasi, partai politik menjadi sebuah wadah bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara, proses-proses pengambilan keputusan bernegara maupun hubungan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.

Partai politik menjadi wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik. Dengan adanya partai politik, rakyat bisa melaksanakan suatu pemilihan umum yang berarti terlaksananya demokrasi di sebuah negara. Sebagai salah satu tolak ukur eksistensi demokrasi di Indonesia, partai politik bisa dengan baik berhubungan dengan masyarakat. Dalam demokrasi kontemporer, partai politik

juga digunakan untuk memberi pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Dapat dikatakan seperti itu, karena aktor penting dalam percaturan politik adalah partai politik dan karena banyaknya kepentingan di dalam partai politik yang membuat partai sangat mempengaruhi kebijakan yang muncul. Sangat menarik untuk dikaji adalah seberapa jauh organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik yang bersangkutan berhasil mengorganisasikan diri sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan konstituennya

Peran partai politik dalam merekrut kader partai adalah sangat penting, ini sesuai dengan salah satu fungsi dari politik itu sendiri yakni rekrutmen politik. Yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah partai politik berfungsi dan mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Hal ini berarti partai menjadi wadah rekrutmen politik (kader) dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di level lokal maupun nasional. Rekrutmen politik tidak saja menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. Sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antar politisi dan antarpolisi politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*political society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*) (Siti Zuhro, 2009: 8).

Di Indonesia telah dibentuk beberapa undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kepartaian tersebut, tentu lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri

Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya (Cheppy Haricahyono, 1991: 191).

Demokrasi yang semakin berkembang membuat banyak partai politik baru muncul dengan gagasan dan ide-ide baru mereka. Partai Gerindra sebagai partai yang baru dua kali mengikuti Pemilu pada tahun 2009 dan 2014 dapat dikatakan sukses meraup suara pada pemilu legislatif 2014 .

Kesuksesan partai Gerindra ini dinyatakan juga oleh “Kenaikan suara secara signifikan dapat terlihat pada pemilu tahun 2009 yang hanya memperoleh suara sebesar 4,4% kemudian naik menjadi hampir 12% pada pemilu tahun 2014” (Sumber: <http://posbali.com/prabowo-effectlonjakkan-suara-gerindra-jokowi-terancam/>)

Walaupun telah diatur dalam undang-undang, rekrutmen politik pada dewasa ini tetap menimbulkan problematika dalam sistem politik di Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang timbul dari rekrutmen politik setelah adanya sistem pemilu proporsional ini adalah; pertama sistem pemilihan umum proporsional telah menguatkan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen, elit partai memiliki kewenangan yang lebih dengan menempatkan seorang dalam nomor urut kecil hanya karna memandang calon tersebut unggul di dalam pendanaan. Kedua proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Menurut Deswanda Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Partai Gerakan Indonesia Raya dalam menentukan calon tidak menggunakan panitia penjangaran, seperti apa yang sudah dilakukan oleh partai politik lainnya. Namun lebih mengedepankan pengurus dan kader internal partai untuk maju pada Pilkada, pihaknya telah diberikan arahan oleh DPD tentang pelaksanaan penjangaran dan aturan telah diterima dalam rapat koordinasi dan dikenakan keharusan untuk para ketua atau kader internal partai maju berkompetisi pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, partai Gerakan Indonesia Raya mengusung Dendi Ramadona dan Eriawan dengan nomor urut 4 sebagai calon

Bupati dan Wakil Bupati dari partai Gerakan Indonesia Raya pada pilkada Kabupaten Pesawaran' (Harianpilar. Com, 25 Februari 2015).

Gerakan Indonesia Raya yang mendukung calon dari eksternal partai dikarnakan ketidak mampuan partai Gerakan Indonesia Raya dalam mengusung calon sendiri dari partai nya. Kelemahan dari proses rekrutmen yang menggunakan sistem tertutup ini syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi calon kepala daerah hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja sehingga masing-masing kepala daerah mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan pada partai politik.

Fungsi rekrutmen ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangansungan hidup sistem politik akan terancam .Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil cukup besar dalam hal menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap amggota-anggota yang dipersiapkan , serta perjuangan untuk kader-kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat *strategic*.

Sukarna (1990:34) mengatakan bahwa apabila pencalonan politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yng merugikan bagi kelanggengan partai politik. Rekrutmen idealnya berfungsi sebagai proses seleksi terhadap individu

yang berada di tingkat akar rumput yang memiliki keinginan, kemampuan dan integritas untuk menjadi partai politik.

Namun ,proses rekrutmen ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan , sehingga hasilnya kader partai politik tidak memiliki integritas dan visi kenegaraan dalam menyelesaikan masalah bangsa ini.

Partai politik sudah saatnya mengubah mekanisme rekrutmen nya agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas. Pengrekrutan itu pertama-tama didasarkan atas faktor kegunaan dan masuknya para calon kedalam birokrasi biasanya dicapai dengan beberapa bentuk ujian yang dibuat untuk menguji faktor tersebut. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik hanya berorientasikan untuk pendanaan partai politik. Dalam realitasnya, proses rekrutemen elite partai yang dilakukan pada umumnya menonjolkan aspek nepotisme. Partai politik tidak lagi memperhatikan kualitas calon anggota partai politik.

Dari berbagai fungsi partai politik tersebut yang paling menonjol adalah fungsi Rekrutmen politik. Rekrutmen politik dapat menentukan arah sebuah partai kedepannya. Gagalnya sebuah partai politik melakukan rekrutmen politik berdampak pada kegagalan sebuah partai politik . Oleh sebab itu Schttschneider mengatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik.

Dalam fungsinya, rekrutmen partai politik harus bisa mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya dan mencakup segala lapisan masyarakat. Tujuannya jelas untuk

menciptakan kelestarian partai serta melahirkan pemimpin yang kompeten, namun apabila partai tidak dapat menyeleksi dengan baik tentu tujuan tersebut tidak bisa dicapai dengan maksimal.

Menurut Rush dan Althoff, (2000: 23) rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas. Dalam sebuah rekrutmen politik yang telah dilakukan akan lahir kader-kader yang akan menentukan daya jual partai politik itu sendiri di muka publik.

Strategi rekrutmen anggota yang dilakukan oleh Partai Gerindra juga mengalami beberapa permasalahan, Pertama masalah anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan (kaderisasi). Jumlah kader muda terus bertambah, namun dana proses kaderisasi terbatas, menjadikan salah satu kendala bagi rekrutmen kader muda. Kedua, masih banyak kaderkader muda yang bergabung ke Partai Gerindra dengan alasan mencoba atau hanya ikutikutan dan tidak jarang juga menjadi kutu loncat, berpindah-pindah partai. Ketiga, untuk merekrut kader-kader muda tersebut biasanya para calon kader belum memahami visi dan nilai-nilai partai politik tersebut.

Hambatan lain yang dirasakan dalam rekrutmen adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai partai politik. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat juga berasal dari pengurus Partai Gerindra yang dirasa kurang memiliki keinginan untuk melakukan tugas pokoknya terkait sosiliasi dan rekrutmen politik.

Kemudian banyaknya kader muda yang belum terinternalisasi dengan nilai-nilai partai.

Rekrutmen politik di Indonesia sejak orde baru sampai orde reformasi mengalami pasang surut. Pada masa orde baru fungsi partai tidak berjalan dengan baik karena partai lebih menitikberatkan untuk menjadi kaki tangan pemerintah dari pada menjadi penyalur aspirasi rakyat sehingga fungsi partai politik melemah, termasuk juga fungsi rekrutmen. Situasi ini digambarkan oleh Sunggono (1992: 176):

“Sebagai ketidak berfungsian partai-partai politik dalam melaksanakan proses rekrutmen anggotanya yang tidak berjalan, karena tidak adanya atau sempitnya kesempatan untuk merekrut, melatih, dan menyeleksi kader-kader yang diorbitkan, di samping itu orang-orang cenderung tidak tertarik atau setidaknya-tidaknya kurang bergairah untuk menjadi aktivis maupun kader partai, karena adanya klik-klik di dalam tubuh partai sendiri, serta gaung konflik yang terus. Akibat fenomena inilah maka banyak partai berguguran dan melahirkan partai tunggal karena partai inilah yang selalu menjadi kaki tangan pemerintah”.

Perkembangan partai politik di Indonesia saat orde reformasi juga telah mengalami kemajuan yang signifikan, seperti yang dikutip pada artikel Rosyada (2014: 5) bahwa:

“Di era reformasi, partai politik mendapatkan ruang yang luas untuk mewujudkan diri sebagai organisasi yang memiliki peran dan fungsi memobilisasi rakyat atas nama kepentingan-kepentingan politik sekaligus memberi legitimasi pada proses-proses politik. Walaupun telah mengalami kemajuan, perkembangan partai politik dalam melakukan perannya masih lemah. Kinerja partai politik saat ini banyak yang hanya fokus pada perebutan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan kelompok saja. Sehingga fungsi dari partai politik kadang tidak berjalan dengan maksimal.”

Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politik

yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Ada dua macam rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen yang tertutup. Dalam rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas.

Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sedangkan dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.

Partai Gerindra adalah salah satu partai politik yang sudah ada di Indonesia, tujuan didirikannya Partai Gerindra adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, Hukum, dan Keadilan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kehidupan demokrasi yang baik partai Gerindra seharusnya mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas. Dimana Partai Gerindra juga memiliki salah satu fungsi menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan

kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . Hal ini dimaksudkan agar apa yang sudah dituangkan didalam Peraturan AD/ART dari partai Gerindra dapat diaplikasikan.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2, menyebutkan proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmen politik secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan suara mayoritas. Sedangkan makna keterbukaan diartikan sebagai upaya partai politik untuk menerima semua golongan atau kelompok masyarakat untuk bergabung dengan partainya dan mengikuti pembinaan serta proses kaderisasi diinternal partai.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah Implementasi Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Gerindra khususnya pada Dewan Pimpinan Cabang Kota Bandar Lampung. Peneliti ingin mengetahui apakah proses perekrutan yang dilaksanakan oleh Gerindra sesuai dengan Undang-Undang dan AD/ART partai atau tidak, sehingga dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas menjadi anggota partai dan pengurus partai yang Loyal Ketika berkecimpung di partai tersebut .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dan menjadi objek penelitian ini adalah. Bagaimanakah Implementasi

rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai Gerakan Indonesia Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Adapun penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui Implementaasi rekrutmen politik yang dilakukan partai Gerakan Indonesia Raya ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, sebagai salah satu kajian akademis tentang partai politik, khususnya berkaitan dengan pola rekrutmen partai politik yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan perihal permasalahan yang sama.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan evaluasi kebijakan politik bagi partai politik khususnya menjalankan fungsi rekrutmen politik dalam menempatkan kader dan non kader partai politik dalam jabatan politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”(Harsono, 2002:67).

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Dari pendapat di atas implementasi perlu adanya indentifikasi siapa implementornya dan peran mereka dalam proses implementasi sehingga implementasi akan lebih mudah dipahami dan dijalankan dalam pelaksanaannya.

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau

tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Vanhorn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Karakteristik badan-badan pelaksana;
4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
(Meter dan Vanhorn, 1975:462-478).

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari

mereka yang menjadi implementer program;

- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :
 - e. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
 - f. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
 - g. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

B. Konsep Rekrutmen

1. Prinsip-Prinsip Rekrutmen

Berdasarkan pada pendapat kepala badan kepegawaian nasional (Rahmadaniza, 2006:10), dalam melakukan rekrutmen sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip rekrutmen yaitu :

- a. Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama. Bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh

haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.

- b. Tidak berdasarkan golongan, agama atau ras. Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis berpendapat bahwa prinsip rekrutmen yaitu proses rekrutmen bisa diikuti oleh semua warga negara tanpa membedakan agama, golongan dan ras dan yang telah memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan.

2. Sumber Rekrutmen

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber calon peserta karena organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Menurut Samsudin (2006:84) Sumber rekrutmen dibagi kedalam dua sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal.

- a. Sumber Internal Rekrutmen peserta dari sumber internal artinya mengisi jabatan- jabatan yang kosong dengan mengambil individu dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Perekrutan dengan sumber internal ini memiliki beberapa kelebihan yaitu organisasi atau perusahaan pasti telah mengetahui individu yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengisi posisi yang kosong. Akan tetapi perekrutan ini pun memiliki

kekurangan yaitu kemungkinan peserta tidak memberikan perspektif baru sehingga organisasi atau perusahaan menjadi tidak menjadi berkembang .

- b. Sumber Eksternal Rekrutmen peserta dari sumber eksternal dilakukan dengan cara menarik calon pegawai yang berasal dari luar organisasi. Pada sumber ini tentu saja calon pegawai harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Kelebihan dari rekrutmen eksternal ini yaitu calon pegawai memiliki gagasan ataupun pemikiran baru bagi perusahaan. Kelemahan dari rekrutmen ini adalah pegawai baru membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa peserta rekrutmen dapat berasal dari dalam organisasi ataupun berasal dari luar/eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati organisasi.

3. Pengertian Rekrutmen Politik

Kajian mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, seperti dalam momentum pemilu ataupun regenerasi kepemimpinan partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar akan berkembang. fungsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang Demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Meninjau dari pendapat tersebut, dalam rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam sistem politik suatu negara. Fungsi rekrutmen tersebut dalam pengaplikasiannya diterapkan oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing-masing. Selain hal tersebut rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi kekuasaan yang lainnya. Dalam kaitannya terhadap partai politik, fungsi rekrutmen merupakan bagian yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan jika gagal melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik terancam keberlangsungannya. oleh sebab itu, partai politik memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di mata masyarakat.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan yang sesuai atau tidak. Dalam ilmu politik, dikenal dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik dan sebagainya) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisiposisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Robert Dahl menggolongkan rekrutmen terbuka menjadi salah satu prasyarat sistem demokrasi selain akuntabilitas, rotasi kekuasaan, adanya pemilu, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara.

Rekrutmen politik memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan pada sistem politik yang demokratis. Berbeda dengan rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri. Rekrutmen politik tertutup biasa terjadi pada negara yang tidak menganut paham demokrasi (Sunarso, *Jurnal Civics* Vol.5 No.2: 2008: 13).

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses rekrutmen di dalamnya. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rekrutmen politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya (Miriam Budiardjo, 2008: 408).

Menurut Afan Gaffar (1999 : 155), rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan Czudnowski (Sigit Pamungkas, 2011:91) mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Lebih jauh, Gabriel Almond (Lily Romli, 2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

Dalam konteks di Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen

politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

Dari pernyataan di atas, tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut, aktor-aktor yang berkecimpung di dalam tersebut harus memiliki kualitas serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Artinya artikulasi kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

4. Pola Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara

satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Lily Romli(2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

a. Rekrutmen terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

b. Rekrutmen tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahuiumum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan

demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. (<http://asyiepha.blogspot.com/2012/07/rekrutmenpolitik.html>).

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93) :

1) *Partisan*

Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai.

2) *Compartmentalization*

Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.

3) *Immediate Survival*

Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.

4) *Civil Service Reform*

Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Dapat dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-

beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Sedangkan menurut Leijennar dan Niemaler (Pippa Norris, 1995:77) ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon anggota partai yakni sebagai berikut :

- 1) Karakteristik kemampuan yang meliputi: pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu- isu politik
- 2) Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan
- 3) Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas ditingkat lokal, dukungan massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan
- 4) Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan beragama,kepedulian, dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga
- 5) Pengalaman politik meliputi: pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai.

Berdasarkan tentang pendapat diatas mengenai tahapan dan pola rekrutmen politik, dapat disimpulkan jika proses rekrutmen bukan hanya

sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-nama orang atau kandidat. Tapi lebih penting dari itu adalah sejauh mana calon anggota yang dipromosikan tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban tugas partai dan amanah para rakyat pemilih.

C. Konsep Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan bagian instrumen bagi masyarakat yang penting. Partai politik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara tersebut melalui penguasaan jabatan politik yang ada

Penguasaan jabatan politik tersebut diraih melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik. selain hal tersebut melalui partai politik ditujukan agar mampu mengartikulasikan kepentingan aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan- kebijakan publik. Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Partai politik juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Banyak dari para ahli yang mendefinisikan tentang partai politik. seperti Gabriel Almond (Mochtar Mas'oeed, 1989:29) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia di mana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai

program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. dengan demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat diartikan sebagai partai politik.

Partai politik menurut Sigmund Neumann dalam buku Efriza(2012: 218) adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.setiap partai politik yang ada di Indonesia beserta dengan aktivis politiknya berupaya keras untuk mendapatkan dukungan politik bagi partainya sendiri, didasari dengan visi misi dan Ideologi partai yang berbeda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiharjo, 2002:161) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material. Sedangkan Menurut Sigit Pamungkas (2011:5), partai politik merupakan sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan tersebut diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum.

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut.

- a. Organisasi jangka panjang. Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
- b. Struktur organisasi. partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
- c. Tujuan berkuasa. partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional. ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.
- d. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. . semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya (Firmanzah, 2008: 67-68).

Dari beberapa definisi di atas, partai politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kesamaan ideologi dan visi-misi sama. partai politik juga memiliki pencapaian tujuan dalam hal menguasai struktur politik dalam pemerintahan suatu negara melalui mekanisme pemilihan umum yang

demokratis. tujuan partai politik juga terletak pada pengawasan tanpa mengesampingkan peran lainnya merebut kekuasaan dari penguasa partai politik lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penempatan anggota-anggota partainya yang memenangi pemilihan umum parlemen.

2. Pembentukan Partai Politik

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) undang-undang kepartaian (undang-undang mengenai partai politik). Undang-Undang kepartaian yang terakhir adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2008, yang didalamnya memuat segala pengaturan mengenai partai politik, termasuk juga syarat pembentukannya. Berikut merupakan persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia menurut Undang-undang Kepartaian No. 2 Tahun 2008 Pasal 2:

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
- 2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- 4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. Asas dan ciri partai politik;
 - b. Visi dan misi partai politik;

- c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
 - d. Tujuan dan fungsi partai politik;
 - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. Kepengurusan partai politik;
 - g. Pendidikan politik; dan
 - h. Keuangan partai politik.
- 5) Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- 1) Partai Politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum.
- 2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , partai politik harus mempunyai:
 - a. Akta notaris pendirian partai politik;
 - b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
 - c. Kantor tetap;
 - d. Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/ kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima

perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota yang bersangkutan; dan

- e. Memiliki rekening atas nama partai politik.

3. Tujuan dan Fungsi Partai politik

Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula tujuan khusus partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain tujuan umum dan tujuan khusus, partai politik juga berwenang menyusun tujuan partainya, yang dapat dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik. Diatur pula mengenai fungsi partai politik yang tertulis dalam pasal 11, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut.

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan ada 4 fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mengadakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) yang berupa pendapat dan aspirasi, kemudian diolah dan

dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Jika tidak ada agregasi dan artikulasi, maka pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Oleh karena itu dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan yang dimasukkan dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

2. Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap parati butuh kaderkader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader yang baik, parati tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan

mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik Konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, terutama pada masyarakat yang sifatnya heterogen. Apakah dari segi etnis, sosial dan ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya (Budiardjo, 2008: 405-409).

Selain fungsi-fungsi partai politik di negara demokrasi yang dikemukakan oleh Budiardjo diatas, dalam bukunya yang berjudul Partai Politik di Indonesia, Suprihatini menyebutkan beberapa fungsi partai politik, antara lain adalah partai politik sebagai:

- a. Sarana partisipasi politik; Artinya, partai politik ini berupaya memobilisasi atau mengarahkan massa (warga negara) ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Fungsi ini merupakan fungsi yang khas bagi partai politik. Keberhasilan fungsi partai politik ditandai dengan semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.
- b. Sarana artikulasi kepentingan; Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan maksudnya, partai politik bertugas menyatakan

kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi.

- c. Sarana agregasi kepentingan; Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai- partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, partai politik juga melakukan tawar menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan dalam penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.
- d. Sarana pembuat kebijakan; Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijaksanaan tidak terlepas dari latar belakang dibentuknya partai politik, yaitu untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. ... dengan kata lain, kebijaksanaan pemerintahan merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan partai politik yang ada (Suprihatini, 2008: 19-20).

Sebagai sarana rekrutmen partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dalam sebuah partai. Miriam Budiardjo (2008: 408) juga mengatakan rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang

berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk kesejahteraan, menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tak dapat dipisahkan. Dalton dan Martin P. Wattenberg (Sigit Pamungkas, 2011:15-20) membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yakni sebagai berikut :

1. Fungsi partai di elektorat pada bagian fungsi partai ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat Empat fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai di elektorat yaitu :

- a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih
- b. Pendidikan warga negara
- c. Membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas
- d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi

2. Fungsi partai sebagai organisasi

Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi partai politik sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut.

Dalam fungsi ini tetdapat Empat fungsi yakni :

- a. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik
- b. Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi
- c. Pengartikulasian kepentingan politik
- d. Pengagregasian kepentingan politik

3. Fungsi partai di pemerintahan Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan di pemerintah. Pada bagian ini terdapat Tujuh fungsi yakni :
 - a. Menciptakan mayoritas pemerintahan
 - b. Pengorganisasian pemerintah
 - c. Implementasi tuntutan kebijakan
 - d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi
 - e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah
 - f. Kontrol administrasi terhadap pemerintah
 - g. Memperkuat stabilitas pemerintahan

4. Tipologi Partai Politik

Setiap partai politik memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Haryanto pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda berdasarkan komposisi dan keanggotaannya, yakni :

1. Partai Anggota (Partai Massa)

Partai anggota atau partai massa, dengan ciri utamanya jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program yang agak kabur. Partai ini memiliki struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan satu kelebihan partai anggota. Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang

jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai.

2. Partai Kader (Partai Pemilih)

Partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Partai kader ini tidak terlalu memiliki banyak anggota seperti pada partai massa karena memang partai ini tidak mementingkan jumlah, tetapi lebih mementingkan disiplin dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Karena jumlah anggota kecil partai kader membutuhkan penggunaan untuk komunikasi dengan pemilih.

Menurut Ichlasul Amal, model partai politik berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, terdapat lima jenis partai politik, yaitu:

- a. Partai Proto adalah tipe partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan dewasa ini. Ciri yang paling menonjol dalam partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau "*ins*" dengan non anggota atau "*outs*". Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat.

- b. Partai Kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat.
- c. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa, berorientasi pada basis pendukung yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.
- d. Partai Diktatorial sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa.
- e. Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirshheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

D. Konsep Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam suatu negara demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Pada negara yang menganut sistem demokrasi pada saat ini tidak dapat terlepas dengan pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu dianggap sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta perwakilannya dalam memperjuangkan aspirasi demi kesejahteraan masyarakat. Pemilihan umum sebagai suatu keharusan dalam kehidupan negara yang menganut sistem demokrasi karena pemilu merupakan bagian dari sistem demokrasi. Oleh sebab itu, hampir semua negara yang menganut sistem demokrasi menjalankan pemilu dan dianggap proses substansial dalam penyelenggaraan negara.

Dalam pasal 1 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pemilu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempraktekkan kedaulatan rakyat yang dimilikinya sebagai cerminan prinsip demokrasi

Jika Secara umum pemilihan umum merupakan sebuah proses pencerminan prinsip kedaulatan rakyat yaitu, proses melalui rakyat memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan politik, maka pemilihan umum harus menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki

hak yang sama untuk diwakili oleh orang-orang yang mereka pilih. Oleh karena itu, pemilihan umum harus menjamin prinsip keadilan, kejujuran, umum, bebas, kerahasiaan dan secara langsung. (Ari Darmastuti, 2004:48-50)

Dieter Nohlen (Joko Prihatmoko, 2008:93) mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Dari pernyataan di atas yang mencoba mendefinisikan pemilihan umum, maka menurut pendapat penulis pemilihan umum merupakan sarana kegiatan politik masyarakat dalam menentukan pilihannya melalui pemberian suara kepada calon-calon yang diajukan oleh partai politik yang notebene sebagai peserta pemilu. Pada prosesnya pemilu harus dijalankan sesuai dengan asas *luber dan jurdil*. Dari hasil pemilu tersebut akan dihasilkan orang-orang yang mewakili aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan negara yang dibuat.

1. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Secara sederhana sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi

yang dimenangkan oleh partai atau calon. Sistem pemilu dibagi menjadi dua kelompok yakni :

1. Sistem distrik

Kriteria dari sistem distrik adalah pada wilayah negara dibagi sistem distrik atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Misalnya anggota DPR ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan, sehingga di setiap distrik hanya akan diwakili satu orang. Ciri pokok sistem pemilihan distrik adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik, melainkan individu atau orang yang dicalonkan oleh partai politik di suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya warga distrik tersebut yang sudah dikenal oleh masyarakat secara baik. Jadi hubungan antara para pemilih dan calon cukup dekat. (Nazarudin Syamsudin, 1993:143).

2. Sistem proporsional

Dalam sistem ini tidak ada pembagian wilayah, karena bersifat nasional. Pembagian kursi di badan perwakilan didasarkan pada jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Jadi dalam satu kesatuan geografis menghasilkan lebih dari satu wakil. Adapun beberapa kelebihan dari sistem ini ialah tidak ada suara yang terbuang karena perhitungan digabungkan secara nasional. Partai minoritas juga berkesempatan untuk mendudukkan wakilnya di legislatif. Namun ada juga kelemahan dari sistem ini, yaitu kekuasaan partai politik menjadi besar karena partai politik yang menentukan orang-orang yang diajukan sebagai calon, akibatnya wakil-wakil yang duduk di legislatif tidak murni

sebagai wakil rakyat tetapi lebih wakil partai politik yang mengusungnya.

(Arifin Rahman, 2002:199- 201)

2. Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu di Indonesia

Hingga pada Pemilihan Umum 2009, Indonesia sudah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, dalam sepuluh kali pemilihan umum tersebut Indonesia juga mengalami tiga era, yakni era Orde Lama, Orde Baru, dan era pasca Reformasi. Pada era Orde Lama diadakan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955, kemudian pada era Orde Baru penyelenggaraan pemilihan umum diadakan sebanyak enam kali yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, sedangkan pada era pasca Reformasi diadakan tiga kali penyelenggaraan pemilihan umum yakni pada tahun 1999, 2004, dan 2009.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia selalu menggunakan sistem proporsional sebagai sistem yang dipakai untuk pemilihan umum. Pasca runtuhnya era Orde Baru sempat ada gagasan tentang merubah sistem proporsional menjadi sistem distrik, namun hal tersebut ditolak dikarenakan tingkat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. Terdapat kekhawatiran ketika sistem distrik dipakai akan banyak kelompok-kelompok yang tidak terwakili khususnya kelompok kecil.

Indonesia sebagai penganut sistem proporsional pada pemilihan umum, telah mengalami mengalami tiga kali perubahan sistem proporsional. Pada Orde Baru Indonesia masih memakai sistem proporsional tertutup, yang artinya masyarakat hanya memilih partai saja dalam pemilihan umum sedangkan

untuk pemilihan wakil rakyatnya ditentukan oleh partai politik. Kemudian pasca reformasi Indonesia mulai berganti sistem proporsional. Dari sistem proporsional tertutup memakai sistem proporsional terbuka dalam pemilihan wakil rakyatnya, dimana masyarakat mempunyai hak untuk memilih calon legislatif pilihannya sebagai dampak konsekuensi dari hal tersebut, wakil rakyat yang terpilih diharapkan memperhatikan konstituen daerah pemilihannya.

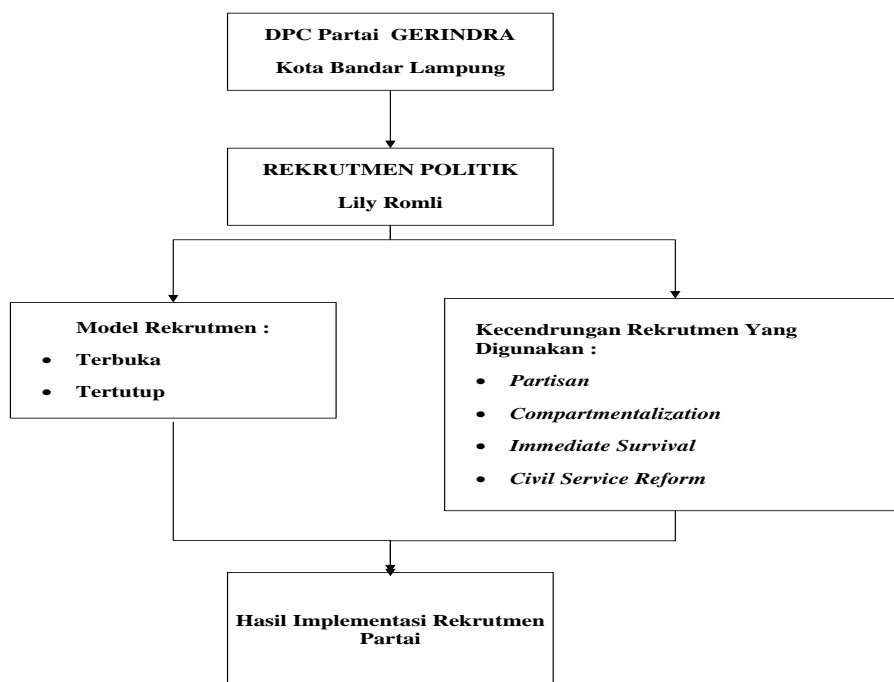
E. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah konsep yang terjadi dari hubungan antara sebab akibat atau kausal hipotesa antar variabel bebas dan variabel terikat atau tidak bebas dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diselidiki (Sukardi, 2005;92).

Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan Warga Negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam partai politik dan kegiatan politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Melalui partai politik dapat diwujudkan Partai politik yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintahan yang sewenang-weang. Salah satu fungsi partai politik yang terpenting dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik dimana agar masyarakat dapat mengembangkan potensi dan mengepakkan sayapnya di dunia politik.

Pelaksanaan rekrutmen politik tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat baik intern maupun ekstern partai. Partai politik perlu melakukan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi hambatan yang ada. Apabila upaya yang dilakukan partai berhasil dan diperkuat dengan faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik, maka partai akan mendapat dukungan dari rakyat untuk memperoleh suara dalam pemilu , kader partai dapat menduduki jabatan-jabatan politik, anggota partai akan bertambah, serta agenda partai dapat berjalan dengan lancar. Apabila upaya gagal dilakukan, maka partai akan mengalami kemunduran, dukungan rakyat tidak ada, anggota berkurang, dan sulit menempatkan kadernya dalam jabatan strategis dalam pemerintahan

Kerangka pikir dalam penelitian Implementasi Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen pada partai Gerakan Indonesia Raya dapat digambarkan dengan alur dibawah ini, sebagai berikut



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu, sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, maka penelitian ini menggunakan Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif, penelitian ini berdasarkan pada sebuah permasalahan yang kemudian dicari sumber-sumber nya untuk menemukan kaitan yang dapat diubah menjadi hipotesis. Deskriptif

kualitatif menurut Bognan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy. J Moelong,2000).

Penelitian kualitatif dilakukan yaitu melalui wawancara secara mendalam kepada para informan yang diharapkan data yang diberikan informan akan memberikan informasi yang sebenarnya dimana tidak ada rekayasa dalam memberikan informasi maupun data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Miles Dan Huberman (1994:6) mengatakan bahwa :

Pengertian kualitatif Miles dan Huberman dalam Baswori Sudikin menjelaskan bahwa salah satu prosedur penulisan yang dihasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengenali subyek dan merasakan apa yang menjadi kegiatan dari suatu penelitian .

Sementara menurut M. Nazir (1998:63) mengenai penelitian deskriptif menjelaskan bahwa :

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek serta kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pada penelitian ini peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk mengamati keadaan yang terjadi dan melakukan wawancara kepada narasumber yang menjadi subyek ataupun fokus penelitian yang berkaitan dengan implementasi fungsi politik Partai Gerakan Indonesia Raya sehingga peneliti mampu menggambarkan dan mendeskripsikan apa yang dapat dipaparkan dari penelitian yang dilakukan .

B. Fokus Penelitian

Hasil pembatasan kegiatan dalam masalah penelitian Kualitatif deskriptif disebut juga dengan fokus penelitian. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purvosipe*, dimana penentuan dari teknik *purvosipe* ini adalah penentuan subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu (Sugiyoni,2012:218). Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang ingin dipaparkan oleh peneliti sesuai dengan Teori Lily Romli Mengemukakan pelaksanaan yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik suatu partai antara lain:

1. Rekrutmen terbuka syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan Kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka ini adalah :

- a. Mekanisme nya demokratis
 - b. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakatnya akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
 - c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
 - d. Melahirkan Sejumlah pemimpin yang berjiwa pemimpin dalam kepemimpinan nya
2. Rekrutmen tertutup berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup,syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat diketahui

secara umum .Partai berkedudukam sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup Kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan . Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini yang menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya .

3. Melalui indikator tersebut maka akan terlihat bagaimana implementasi rekrutmen politik Partai Gerakan Indonesia Raya .

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian dapat ditemukan . Herdiansyah, (2012:56) menjelaskan bahwa Lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses pengambilan data, Kemudian dari defenisi tersebut apabila dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka lokasi penelitian yang ditentukan secara sengaja (*Purvosipe*) dan mendasarkan pada masalah-masalah yang terjadi dilapangan .

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya. Alasan lokasi tersebut yang menjadi penelitian dikarenakan lokasi yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi rekrutmen Politik Partai Gerakan Indonesia Raya . Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Cuk Nyak Dien No.62, Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan Jl. Hayam Wuruk No.109, Tj. Baru, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 35128.

D. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keperluan dalam penelitian ini. Informan yang diperlukan untuk memperoleh data primer yaitu antara lain :

1. Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung
2. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung
3. Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung
4. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung
5. Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya

E. Jenis Data

Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan informan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Menurut Neuman adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Kualitatif deskriptif(2014), jenis data utama dalam penelitian Jenis data dalam suatu penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder (Subagyo,2006:87-88).

Data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen ,kemudian dari pada itu data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Menurut Bungin (2004:122), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Wawancara dan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber di lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara terbuka. Sehingga sumber data yang dijadikan data primer adalah data berupa hasil wawancara yang didapat peneliti dari Informan .

Informan yaitu orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. (Moeleong,2010:157). Informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPD,Sekretaris DPD Provinsi Lampung ,Ketua DPC , Sekretaris DPC Kota Bandar Lampung serta anggota/kader partai.

2. Data sekunder

Data Sekunder menurut Bungin (2004:122) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data-data yang berasal dari artikel dan karya ilmiah yang dipublikasikan di internet maupun di perpustakaan Unila , buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan surat kabar terkait dengan materi partai politik, AD/RT ,Surat Keputusan,arsip-arsip serta *literature* lainnya yang berkaitan dan mendukung didalam penelitian ini.

F. Sumber Data

Menurut Iman suprayoga sumber data dalam penelitian deskriptif kualitatif terbagi atas beberapa yaitu Narasumber (Informan), Peristiwa (Aktifitas) ,

Dokumen atau arsip . Sumber data yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Narasumber (informan)

Narasumber atau informan merupakan sumber data yang berupa manusia, yaitu dimana seseorang yang bisa memberikan Informasi tentang sesuatu yang ingin diketahui peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Informan dalam penelitian ini yaitu Pengurus DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung dan Ketua DPC serta anggota kader partai.

2. Peristiwa (aktifitas)

Peristiwa atau aktifitas yang bisa ditangkap oleh peneliti sebagai data adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPD dan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya. Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian . peristiwa yang menjadi sumber data dalam hal ini yaitu kegiatan Implementasi rekrutmen politik Partai Gerakan Indonesia Raya di Lampung .

3. Tempat atau Lokasi

Tempat atau Lokasi merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor DPD dan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya.

4. Dokumen atau arsip

Dokumen yang digunakan dan dijadikan sebagai sumber pendukung adalah dokumen yang terkait dengan Partai Gerakan Indonesia Raya .

Dokumen atau arsip ini dapat berupa tulisan yang berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan suatu partai. Dokumen dalam suatu penelitian ini dapat berupa bahan tertulis seperti arsip, surat-surat, rekaman dari media elektronik, foto-foto, gambar yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilakukan .

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti yang sedang mengadakan penelitian karena menyangkut bagaimana cara yang digunakan untuk memperoleh data. Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan , maka teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Wawancara

Menurut Lexy J.Moeloeng (2010:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang melibatkan dua pihak yakni pewawancara dengan terwawancara. Menurut Patton (1980:197) dalam Lexy Moeloeng (2010:187), wawancara dibagi menjadi tiga berdasarkan perencanaan pertanyaan ,yakni wawancara pendekatan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara , dan wawancara buku terbuka. Dalam wawancara ini digunakan wawancara jenis kedua, yakni wawancara terstruktur dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara akan memudahkan peniliti untuk mencapai ketiga tujuan penelitian yang telah ditetapkan diawal.

Teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam ini tidak dilakukan secara ketat dan formal, hal ini dimaksudkan agar informasi yang dikumpulkan memiliki kedalaman yang cukup.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara kepada informan yang telah ditetapkan, dimana wawancara merupakan alat *re-checking* telah atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh terlebih dahulu. Peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan yakni pengurus inti dari partai Gerakan Indonesia Raya, dimana akan diperoleh keterangan dari tujuan penelitian itu sendiri dengan menggunakan pedoman (*guide/draft*) wawancara serta beberapa topik yang telah disertakan oleh peneliti yang didiskusikan bersama –sama dengan peneliti dan informan.

Wawancara mendalam ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

a. Tahap Persiapan Penelitian

Peneliti telah membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Pedoman wawancara antara lain berisi pertanyaan- pertanyaan mendasar yang berkembang didalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun kemudian ditujukan kepada yang lebih ahli untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing . Peneliti kemudian membuat perbaikan dan menyusun kembali daftar wawancara yang

berisi pertanyaan untuk dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya .

Tahap selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang telah disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subyek penelitian selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan dari subyek wawancara. Peneliti selanjutnya mencari subyek yang sesuai dengan karakteristik subyek penelitian . dan sebelum wawancara dilakukan sebelumnya peneliti telah menghubungi subyek yang akan di jadikan didalam penelitian . kemudian menanyakan mengenai kesiapan dan kesepakatan subyek dan melangsungkan proses wawancara.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti telah membuat kesepakatan dengan subyek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Setelah wawancara dilakukan maka peneliti memindahkan hasil wawancara tersebut kedalam bentuk tulisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari lembaga instansi yang terkait. Dokumentasi Merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Cara ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip dari buku, internet dan sumber lainnya

yang diperlukan oleh peneliti. Dokumentasi tersebut menjadi sumber data untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Lexy J Moeloeng, 2010:216). Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya, Peraturan-Peraturan yang diberlakukan partai Gerakan Indonesia Raya, Dokumen tertulis, data statistik, Laporan penelitian sebelumnya, dan tulisan-tulisan ilmiah tentang partai Gerakan Indonesia Raya.

3. Pengamatan (Observasi)

Dalam melakukan observasi dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pengamatan. Pengamatan dalam hal ini merupakan pengumpulan data yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti maupun informan dalam suatu proses pdalam suatu proses penelitian ini dan tahap pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh peneliti. Peneliti tidak masuk kedalam komunitas dari partai Gerakan Indonesia Raya melainkan hanya sebagai pengamat dilingkungan Partai yang sedang diteliti.

Spradly (1980:77-78) mengemukakan bahwa informasi yang diperoleh dalam observasi umum sangat penting bagi peneliti yang tidak memiliki pengetahuan umum yang cukup tentang keadaan setempat dan masyarakat. Aktivitas dalam hal ini disebut juga dengan *grand tour observation*.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini merupakan analisis data model interaktif yang menggunakan tiga komponen yaitu pemilihan data, penyajian data dan menarik kesimpulan .

Proses analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) merupakan “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain “.

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian , maka selanjutnya adalah melakukan analisis data:

1. Data

Data yang dapat diperoleh berwujud kata –kata yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui observasi ,wawancara mendalam serta data dokumentasi, Kemudian data yang diperoleh melalui pencatatan lapangan dianalisa melalui beberapa tahap yaitu pemilihan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan . Data –data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara yang telah dilakukan .

2. Pemilihan data atau Reduksi Data

Merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data

tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan.

a. Teknik Memaknai

Teknik memaknai merupakan mengelompokkan data sesuai dengan bagian-bagiannya, melihat keterkaitan antar data membangun rantai logika dan akhirnya membangun konsep-konsep dari teori yang bervariasi.

b. Teknik Mengkonfirmasi Data

Teknik mengkonfirmasi data merupakan memahami makna dengan mengetahui kualitas data yang diperoleh. Setiap data yang tidak memenuhi persyaratan dipisahkan. Dalam tahap ini peneliti juga meyakinkan kualitas kesimpulan yang ada. Diharapkan peneliti akan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan proses konklusi yang terjadi selama pengumpulan data dari awal sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang perlu diverifikasi yang dapat berupa suatu penggolongan yang meluncur cepat sebagai pemikiran yang sudah dirancang dalam kerangka pikir suatu penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Partai Gerakan Indonesia Raya

1. Sejarah Partai Gerakan Indonesia Raya

a. Sejarah Berdirinya Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerakan Indonesia Raya atau disingkat Partai Gerindra adalah sebuah partai politik yang dapat dikatakan baru dikancah perpolitikan Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai partai politik didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Suhardi M. Sc, seorang dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Pembentukan Partai Gerakan Indonesia Raya diprakarsai oleh seorang intelektual muda Fadli Zon dan seorang pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, pada November 2007 keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Dan secara kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dengan alasan itu mereka ingin mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan.

Didasari oleh perdebatan tersebut, Hashim tersinspirasi dari kata-kata politisi abad 18, Edmund Burke : *The only thing necessary for the triumph[of evil] is for good men to do nothing.* dalam Bahasa Indonesia “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak”. Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Dengan tujuan tidak lain agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Dari kata-kata itulah, Fadli Zon mengajak Hashim untuk membentuk partai baru yang bertujuan untuk membentuk haluan serta harapan baru. Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot akhirnya disepakati mereka akan membentuk Partai Baru yang memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan dilingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo Subianto. Kebetulan pada saat itu Prabowo Subianto adalah anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, dan dianggap paling berkredibel untuk menjadi ketua umum partai sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun setelah melewati banyak proses, maka terpilihlah Prabowo Subianto sebagai Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya.

Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah yang menjadi markas IPS (*Institute for Policy Student*), berkumpul

tokoh-tokoh penting seperti Fadli Zon, Ahmad Muzani, M.Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi serta Haris Bobihoe. Mereka bersama membahas tentang AD/ART untuk partai yang akan dibentuk. Hingga akhirnya, Gerakan Indonesia Raya menjadi nama partai yang diciptakan oleh Hashim. Sedangkan logo Kepala Burung Garuda adalah gagasan Prabowo Subianto.

Latar belakang didirikannya Partai Gerakan Indonesia Raya tidak terlepas dari keresahan para pelopornya yang melihat kondisi bangsa demikian labilnya. Penderitaan masyarakat yang sudah berakar dan sistem ekonomi pasar memunculkan banyaknya pengangguran dan memporak- porandakan perekonomian bangsa. Berangkat dari situlah maka didirikanlah sebuah partai yang mampu menjawab tantangan permasalahan tersebut. Sebuah partai politik yang mampu merumuskan dan melaksanakan ekonomi nasional untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat dari keadaan melarat.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelamatan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar

telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, Partai Gerakan Indonesia Raya terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

Partai Gerakan Indonesia Raya didirikan untuk melakukan perubahan besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya mensosialisasikan tema perjuangannya dengan tema keberpihakan kepada rakyat kecil. Perjuangan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya hadir membawa terobosan baru untuk memperbaiki kekeliruan sistem ekonomi yang dilaksanakan ekonomi kapitalisme.

Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan sebuah partai nasionalis. Sesuai dengan salah satu jati diri Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu kebangsaan. Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan ini menjadi jiwa dalam segala aspek kehidupan berbangsa, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan globalisasi, identitas dan jati diri bangsa tetap menjadi fondasi utama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk memperjuangkan kepentingan

nasional dan tatanan baru. Sistem pemerintahan presidensial murni dan sistem politik yang berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila menjadi haluan baru politik Indonesia. sesuai dengan motto partai Gerakan Indonesia Raya “Haluan baru, pemimpin baru bagi Indonesia Raya”. Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan haluan baru sebagai upaya koreksi total terhadap sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan pertahanan dalam dan luar negeri. Partai Gerakan Indonesia Raya melakukan koreksi total terhadap sistem politik ketatanegaraan yang liberal yang hanya menciptakan kebebasan sebesar-besarnya tanpa mensejahterakan rakyat.

b. Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Raya

Pembentukan Partai Gerakan Indonesia Raya terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masakampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, tersusun visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.³² Berikut ini adalah Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Raya:

Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Raya Bismillah irrahmani rrahim. Terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, hanya dapat dicapai

dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan landasan Pancasila. Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan diantara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian Nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, dalam perjalanannya kita telah terjebak sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia, atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, kami yang bertanda tangan di bawah ini MENDEKLARASIKAN BERDIRINYA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang dibangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Jakarta, Pebruari 2008.

Setelah Partai Gerakan Indonesia Raya di deklarasikan, maka pada tanggal 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan partai ini lolos verifikasi dan sah menjadi partai politik yang ikut berpartisipasi didalam kancah perpolitikan Indonesia.

B. Makna Lambang / Tanda Gambar Partai Gerindra



Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah.

Ditengah nya terdapat gambar kepala burung garuda dengan warna kuning kekemasan , melambangkan kemakmuran .

Menghadap kekanan melambangkan kebernaian dalam bersikap dan berindak. Kepala Burung dan jambul pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17 terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala burung garuda persegi 5 yang menyimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia 17-8-45.

Diatasnya bertuliskan PARTAI berwarna hitam ,dibawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, dibawahnya lagi ada tulisan Gerakan Indonesia Raya berwarna Hitam.

C. Visi dan Misi Partai Gerakan Indonesia Raya

Visi misi partai tercantum pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Gerakan Indonesia Raya. Visi partai Gerakan Indonesia Raya adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan

berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Misi partai Gerakan Indonesia Raya adalah:

1. Visi Partai Gerakan Indonesia Raya

Visi partai Gerakan Indonesia Raya adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik Negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi Partai Gerakan Indonesia Raya

Adapun Misi Partai Gerakan Indonesia Raya terdiri dari:

- a. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pemabngunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing.
- c. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- d. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar belakang golongan.

- e. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu legislatif dan pemilu presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

Dari penjabaran mengenai visi misi partai Gerakan Indonesia Raya, terlihat bahwa partai ini cenderung lebih bersifat nasionalis yang dilatar belakangi sejarah perjuangan pembentukan partai Gerakan Indonesia Raya. Visi misi partai Gerakan Indonesia Raya juga dilatar belakangi oleh manifesto perjuangan partai yang berisi tentang semangat perjuangan partai yang dimulai pada saat partai Gerakan Indonesia Raya melaksanakan deklarasi pada tahun 2008.

D. Prinsip Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya

Dalam mewujudkan visi dan misi, Partai Gerakan Indonesia Raya mengacu pada prinsip- prinsip dasar sebagai berikut :

1. Prinsip Disiplin

Disiplin merupakan prinsip dasar dari seluruh perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya dalam mencapai tujuan bersama. Dengan disiplin, seluruh sumber daya terfokus dan terorganisir sehingga mencapai usaha maksimal. Dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, Partai Gerakan Indonesia Raya senantiasa mengedepankan disiplin dalam setiap gerak dan langkah.

2. Prinsip Kedaulatan

Kedaulatan merupakan perwujudan sejati dari sebuah kemerdekaan, yang meliputi kedaulatan atas diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menghargai dan menghormati kedaulatan setiap entitas merupakan

landasan penting dalam tata pergaulan sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Gerakan Indonesia Raya bersikap dan bertindak berdasarkan penghormatan dan penghargaan terhadap kedaulatan setiap individu serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

3. Prinsip Kemandirian

Kemandirian dimaknai sebagai bekerja dan berkarya berdasarkan kemampuan diri sendiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Kemandirian juga dimaknai sebagai manifestasi dari kepercayaan diri dan penghargaan atas diri sendiri serta menempatkan setiap individu sebagai entitas yang memiliki kemampuan dan karya. Partai Gerindra bersikap dan bertindak berdasarkan kemampuan yang dimiliki serta menghargai kemandirian setiap individu.

4. Prinsip Persamaan Hak

Dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki persamaan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Tak ada yang dikecualikan dan dibedakan haknya, kecuali dikarenakan oleh karya dan kerja individu itu sendiri. Partai Gerakan Indonesia Raya bersikap dan bertindak dengan mengedepankan persamaan hak setiap individu dan mengembangkan sikap anti diskriminasi.

5. Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong

Sikap kerjasama dan gotong royong yang dilandasi oleh penghormatan atas kedaulatan, kemandirian, dan persamaan hak dalam mengerjakan dan menuntaskan sebuah pekerjaan sejatinya merupakan kebutuhan setiap manusia

sebagai makhluk sosial. Tidak ada individu yang bias hidup tanpa membutuhkan individu lain. Partai Gerakan Indonesia Raya sangat menyadari pentingnya kerjasama, karena itu dalam setiap sikap dan tindakan, Partai Gerakan Indonesia Raya mengedepankan dan mengembangkan kerjasama dan gotong royong dengan entitas masyarakat lainnya sebagai landasan pergaulan berbangsa dan bernegara.

6. Prinsip Musyawarah

Musyawarah merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang arah memberikan penghormatan kedaulatan individu dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Musyawarah harus dijadikan jalan utama dalam memecahkan setiap permasalahan sehingga tidak memunculkan konflik dan kebuntuan. Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi garda terdepan dalam pelestarian nilai-nilai musyawarah dengan mengembangkan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan Bangsa.

7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
8. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E. Tugas Partai Gerakan Indonesia Raya

Tugas pokok yang menjadi kewajiban setiap pengurus, kader, dan anggota partai Gerakan Indonesia Raya untuk ditunaikan adalah :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan; dan
6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

F. Tujuan dan Fungsi Partai Gerakan Indonesia Raya

- a. Tujuan Partai Gerakan Indonesia Raya
 1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945.
 2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan Demokrasi, yaitu menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum dan Keadilan.
 5. Mewujudkan ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
- b. Fungsi Partai Gerakan Indonesia Raya
1. Sarana Pembentukan dan pembangunan karakter Bangsa
 2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajiban nya seabagi warga negara
 3. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan menetapkan kebijakan negara
 4. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila
 5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara
 6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 7. Mempertahankan ,mengemban ,mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku,agama ras dan golongan.

8. Menyerap, menampung ,menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

G. Susunan Kepengurusan DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Lampung

Sesuai dengan AD/RT Partai Gerindra Pasal 17 mengenai organisasi memperlihatkan bahwa struktur organisasi partai Gerindra terdiri dari tingkat pusat atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD), tingkat Kabupaten/Kota atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tingkat Kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan tingkat Desa/kelurahan atau Pimpinan Ranting (PR).

Sementara itu dari Pengurus Pusat sampai Ranting, masing terdiri dari dua kepengurusan yaitu Dewan Pengurus dan Pengurus Harian.Struktur Pengurus Harian dari pusat sampai ranting sebagai berikut:Ketua-Wakil-wakil Ketua-Sekretaris-Wakilwakil sekretaris-bendahara-wakil-wakil bendahara.

1. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Lampung

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	H.Gunandi Ibrahim , SE
2	Wakil Ketua	Drs.Mihdar Ilyas, MM
3	Wakil Ketua	M.Jimmy Khomeni,SE,MM\
4	Wakil Ketua	Ny.Elly Wahyuni,SE,MM
5	Wakil Ketua	Ikhwan Fadli Ibrahim, SH
6	Wakil Ketua	M.Fahrudin
7	Wakil Ketua	Azwar Safarudin
8	Wakil Ketua	Ny.Watiah
9	Wakil Ketua	Hendra
10	Wakil Ketua	Drs.Md.Kresna
11	Wakil Ketua	I Made Suarjaya ,SH
12	Sekretaris	Pattimura,SE
13	Wakil Sekretaris	War S Basuki
14	Wakil Sekretaris	A.Arfan Feri Dalimonte

15	Wakil Sekretaris	Arsoni Paslah
16	Wakil Sekretaris	Ny.Hj.Meisy Leliyana Sari,SE
17	Wakil Sekretaris	Willy Lesmana
18	Wakil Sekretaris	Ny.Elis Herlina,SE ,MM
19	Wakil Sekretaris	Ny.Trie Eka Fitri
20	Wakil Sekretaris	Ny.Nyi Ayu Faziah
21	Wakil Sekretaris	Ny.Aderly Imelia sari ,ST
22	Bendahara	Harry Ananda
23	Wakil Bendahara	Munawir Somad
24	Wakil Bendahara	Ny.Imelda
25	Wakil Bendahara	Vinarto,S.AG
26	Wakil Bendahara	Ny.Dwi Oktaviani,SE

Sumber : Arsip DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung

2. Susunan Personalia Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Lampung

No	Jabatan	Nama
1	Anggota	Drs.Hi.Azahari Ali
2	Anggota	Ir.Hi.Rahmat Abdulah
3	Anggota	Ir.Hi.Ibrahim B.S
4	Anggota	Drs. Hi. Risman Sesunan,MM
5	Anggota	Drs.Murjito
6	Anggota	Drs. Sutomo
7	Anggota	Drs.H. Rusdi Harryono, MM
8	Anggota	Drs. Ahmad Nyerupa,SH
9	Anggota	Drs.H. Amir , AR
10	Anggota	Drs.Lazuardi Alwi
11	Anggota	Abdurahman Bafadhol
12	Anggota	Drs.Rifdi Arif, MM
13	Anggota	Drs.H Erpani S.Jaya
14	Anggota	Dadang Amirudin
15	Anggota	Ben Bella
16	Anggota	Kisro Eddy
17	Anggota	Hj.MulyanaGusriani
18	Anggota	Ir.Johansyah
19	Anggota	Koharidin
20	Anggota	Mega Putra
21	Anggota	Yan Rofialam
22	Anggota	Ahmad Hassan
23	Anggota	Erwin Kartadilaga
24	Anggota	Endang Mustika
25	Anggota	Dra.Ummu Khoir
26	Anggota	Ulfa Irasrika
27	Anggota	Ratan Gofalda
28	Anggota	M.Fadli
29	Anggota	Drs.Hi. Wasti Burhan, MM

30	Anggota	Darlihan Pone,SH,MM
31	Anggota	Junaid B.M
32	Anggota	Ali Sutono
33	Anggota	Santoni Sawang
34	Anggota	Herdiansyah Manaf
35	Anggota	Raharja Bastari

Sumber : Arsip DPD Partai Gerindra Lampung

3. Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	H.AndikaWibawa, SR.SE.MM
2	Wakil Ketua	Ahmad Riza S.P
3	Wakil Ketua	Roy Dwi Suryono ,S.E. M.si
4	Wakil Ketua	Ahmad Giri Akbar, S.E. M.Ba
5	Wakil Ketua	Macro Aulia S.E
6	Wakil Ketua	Ny. Dr Yayuk Rachmawati
7	Wakil Ketua	Ny.Yusni Aisah
8	Wakil Ketua	Hj.Halimah Tusadiah
9	Wakil Ketua	Ny.Retno Angrgreini S.E
10	Wakil Ketua	Ir.Darmawansyah
11	Sekretaris	Nasrullah Nawawi S.E
12	Wakil Sekretaris	Zainuddin
13	Wakil Sekretaris	AbdullahIdoSyahputra S.T.M.M
14	Wakil Sekretaris	Jauhari, S.H
15	Wakil Sekretaris	Iswandy Kunang
16	Wakil Sekretaris	Ny.Drg Devi Andriani
17	Wakil Sekretaris	Ny. Nofaridah
18	Wakil Sekretaris	Ny.Eli Gustiani, S.sos
19	Wakil Sekretaris	Ariandi Taufiik
20	Wakil Sekretaris	Alfian Ayub Khan
21	Wakil Sekretaris	Herly M. Zen
22	Bendahara	Imam Santoso S.H
23	Wakil Bendahara	Drs. Didi Heriyanto
24	Wakil Bendahara	Febri Utama
25	Wakil Bendahara	Ny. Asih Suksesih
26	Wakil Bendahara	Ny. Erlinda

4. Susunan Penasehat Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan
1	Ketua	Syahrir Bawar
2	Anggota	H.Ismail Zulkarnain
3	Anggota	Muhammad Yunus Anang
4	Anggota	H.Bernas Yuniarta S.E
5	Anggota	Suprianto Malik S.H
6	Anggota	Ferri Setiawan
7	Anggota	Dody Desmond
8	Anggota	Suryanto Salim
9	Anggota	Khairullah Baidilah
10	Anggota	Ny.Dra Hj Sri Mulyanti Sofyan
11	Anggota	Ny.Sandra Fiana
12	Anggota	Ny.Imelda
13	Anggota	Ny.Sella

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh Gerakan Indonesia Raya dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan website serta melalui keaktifan kader Gerakan Indonesia Raya.
2. Gerakan Indonesia Raya melaksanakan kaderisasi untuk meningkatkan SDM partai, menyiapkan kader partai yang berkualitas yang akan memudahkan dalam perekrutan calon pemimpin. Bentuk kegiatannya berupa lokakarya, Kursus Guru Kader , seminar, dan diklat kader Gerakan Indonesia Raya.
3. Faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik Gerakan Indonesia Raya adalah: dana, SDM anggota partai, anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil.
4. Model rekrutmen yang digunakan dalam merekrut anggota baru yaitu rekrutmen terbuka

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Partai politik perlu meningkatkan implementasi kinerja partai serta merealisasikan program kerja partai secara riil yang bermanfaat untuk masyarakat agar usaha untuk mengajak masyarakat bergabung dengan partai berhasil dengan lebih baik.
2. Mengingat pentingnya Rekrutmen , maka Gerakan Indonesia Raya perlu mengoptimalkan dalam hal pelaksanaan rekrutmen partai.
3. Gerakan Indonesia Raya perlu menampilkan eksistensi partai, misalnya melalui dialog terbuka secara berkala dengan kelompok-kelompok masyarakat, kalangan intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat yang diliput secara meluas oleh media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat dapat lebih mengenal Gerakan Indonesia Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Miriam, Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam, Budiardjo. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong J, Lexy 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdikarya.
- Surbakti, Ramlan 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grsindo Gramedia Widia Sarana.
- Syamsuddin, Nazaruddin 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta . Gramedia.
- Usman, Husni. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung. Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Fadilah, Putra, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT. Pustaka Pelajar.
- Burhan Bungin, 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif dan Kualitas*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Pito, Toni Andrianus, et. Al. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung. Penerbit Nuansa.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta. Graha Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik* Jakarta: Buku Obor
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset

- Drs. Haryanto. 1984. *Partai Politik Suatu tinjau umum* Yogyakarta. Liberty
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for strategic and International Studies, Jakarta.
- Ekana, Yana 2008. *Bahan ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Lampung. Lampung.
- Arikunto. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manulang, M.(2004). *Pedoman Teknis Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Amal, Ichlasul, 1996, *Teori-Teori Mukthahir Partai Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Gaffar, Affan. 1991. *Demokrasi Empiris Dalam Era Orde Baru*, dalam Alfian dan Nazarudin Syamsuddin, *Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Grafiti.
- Haryanto, 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Marsh, David dan Stoker, Gerry. 2002. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusamedia.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal70 2 Guntur Setiawan, Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal39.
- Andre Krouwel. 2006. *Party Model , Handbook of Party Politics*. Los Angeles: Sage Publications.
- Andi Prastowo. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.
- Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Friedrich. 1967. *Constitutional Goverment And Democracy*. Weltham: Blaisdell Publishing Company.
- Jurnal.**
- Liliy Romli. 2005. *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3, hal 19.

Internet:

(http://www.kompasiana.com/pandu_wibowo/kekuatan-ideal-partai-politik_55290968f17e61db2d8b4577).

(http://www.kompasiana.com/pandu_wibowo/kekuatan-ideal-partai-politik_55290968f17e61db2d8b4577).

(<https://drsfirmansyah.wordpress.com/2012/07/14/50/>)

www.kpu.go.id

www.partaigerindra.or.id

(Harianpilar. Com, 25 Februari 2016)

Selengkapnyahttp://www.kompasiana.com/hatipikiranpandanganpenggambaran/analisis-fenomena-partai-politik-di-indonesia_550e4fc0813311ba2cbc628f

Sumber Lain :

AD/ART Partai Gerindra

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Partai Politik.